

Ahok Minta Jaksa Periksa Erick Thohir & Jokowi

Dari Halaman 1

Mas'ud Khamid, keduanya mantan direksi pada anak perusahaan Pertamina, subholding. Satu di KPI, satu di PPN. Disebut sudah dicopot. Apakah ada persoalan dengan dua orang ini sehingga disebut dicopot? Ada masalah tidak?" tanya jaksa dalam persidangan.

Menjawab pertanyaan itu, Ahok justru menyampaikan pujian terhadap keduanya. Ia menyebut Joko Priyono dan Mas'ud Khamid sebagai dua direktur terbaik yang pernah dimiliki Pertamina.

"Bagi saya dua saudara ini adalah dirut yang terhebat yang Pertamina punya, untuk memperbaiki produksi kilang termasuk Patra Niaga. Semua yang saya arahkan mereka kerjakan," ujar Ahok.

Menurut Ahok, Mas'ud Khamid bahkan lebih memilih diberhentikan daripada menantang pengadilan yang dimilainya menyimpang.

"Termasuk soal aditif ini, Pak Mas'ud ini lebih baik dipecat daripada tanda tangan kalau

ada penyimpangan pengadaan. Makanya saya bilang ini salah satu terbaik yang kita punya," ungkap Ahok.

Ahok juga menilai, Joko Priyono sebagai sosok yang memiliki pemahaman mendalam soal kilang karena latar belakang teknisnya.

"Pak Joko ini orang kilang, asli dari kilang. Pengetahuannya paling bagus soal kilang. Dia yang tahu saya kelemahan kilang, apa yang mau diperbaiki. Ketika dia dicopot, saya sampai nangis," beber Ahok.

Ia mengaku sempat menelepon Joko Priyono setelah pencopotan tersebut. Ia memandang, pencopotan itu sebagai bentuk kesewenangan.

"Dia bilang, 'Pak, sudahlah Pak, saya di Yogyakarta saja.' Saya pikir BUMN ini keterlaluan, mencopot orang yang bukan karena meritokrasi. Kenapa orang yang mau melakukan hal yang benar justru dicopot? Ini orang terbaik, makanya saya tulis dicopot dalam BAP," tegas Ahok.

Merasa ada kejanggalan dalam pencopotan dua direksi tersebut, Ahok pun mendorong jaksa untuk memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk Erick Thohir dan Presiden ke-7 RI

Joko Widodo, guna mengetahui alasan di balik keputusan itu.

"Makanya saya selalu bilang ke pak jaksa, kenapa saya mau lapor ke jaksa? Periksa sekalian BUMN, periksa Presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik dicopot?" cetus Ahok.

Pernyataan itu sempat memicu tepuk tangan dari pengunjung sidang, sehingga majelis hakim harus memberi teguran.

"Tolong pengunjung bisa tertib. Ini persidangan, bukan hiburan. Tolong jangan bertepuk tangan," tegas hakim.

Menanggapi dorongan Ahok agar Erick Thohir dan Jokowi diperiksa, jaksa menyatakan bahwa keterangan tersebut tidak berkaitan langsung dengan penggalian pengetahuan Ahok sebagai saksi dalam perkara yang sedang disidangkan.

"Itu kan fakta dari keterangan saksi. Namun saksi sendiri tidak menjelaskan fakta yang mana, detail perbuatan seperti apa, itu tidak pernah dikemukakan di persidangan. Tidak ada dokumen atau keterangan dari Pak Ahok yang bisa memastikan fakta tersebut," pungkasnya. (bes/js)

KPK Ungkap Peluang Periksa Jokowi

Dari Halaman 1

Setyo menyebut, KPK tidak serta merta langsung memanggil Jokowi untuk diperiksa dalam kasus korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut tersebut.

"Pastinya ada kajianya terlebih dahulu. Apakah saksi (yang diperiksa) sudah cukup (atau masih butuh keterangan saksi lain). Proses penegakan hukum itu kan murah, cepat, sederhana, prinsipnya gitu. Meskipun seringkali ada

juga yang prosesnya agak lambat," jelasnya.

Saat ditenggaknya kembali rencana pemanggilan Jokowi, pimpinan lembaga antirasuah ini menyerahkan proses tersebut kepada penyidik.

"Ya itu (tergantung) penyidik lah," tukasnya.

Peluang untuk memanggil Jokowi dalam kasus korupsi kuota haji sebelumnya disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Nama Jokowi nyaring dalam kasus tersebut karena penambahan kuota haji Indonesia didapat setelah kunjungan luar negeri Jokowi bertemu Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS).

"Siapa pun nanti (termasuk Jokowi) berdasarkan kebutuhan dari penyidik (akan diperiksa)," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 23 Januari 2026.

Terbaru, KPK telah memeriksa mantan Menpora Dito Ariotedjo sebagai saksi untuk tersangka Yaqut Cholil Qoumas pada Jumat, 23 Januari 2026.

Selain Dito, KPK juga memeriksa General Manager PT Gaido Azza Darussalam Indonesia, Sulistian Mindri, serta Bayu Putra, seorang PPPK di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag.(rm/js)

MUI Sarankan RI Mundur dari Board of Peace

Dari Halaman 1

terwujud kalau tidak ada justice atau keadilan.

Prof. Sudarnoto mengatakan, masalah utama dunia saat ini, adalah ketidakadilan global. Sehingga membuat kacau peradaban dunia itu.

"Kita berharap betul supaya pemerintah meninjau ulang, berpikir ulang, atas keberadaannya sebagai anggota Board of Peace. Saya kira masih ada waktu," kata Prof. Sudarnoto.

Stampel Moral

Hal senada dikatakan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) dalam acara diskusi bertajuk "Indonesia Gabung Board of Peace,

Untung atau Buntung?", yang digelar di Jakarta Pusat, Selasa 27 Januari 2026.

HNW sangat berharap pemerintah mempertimbangkan kembali keanggotaan dalam Board of Peace.

"Jangan sampai Indonesia hanya jadi stempel untuk moral, legitimasi komunitas umat Islam terbesar. Kalau demikian kan sangat tidak menguntungkan Indonesia," kata HNW.

Pasalnya, kata HNW, alih-alih menghadirkan Palestina merdeka, sebagaimana yang disuarakan Indonesia, stempelnya justru mengabadikan penjajahan.

"Saya yakin Indonesia tidak mau, dan Presiden Prabowo juga pasti tidak mau," kata

politikus PKS ini.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangi Board of Peace Charter pada Kamis 22 Januari 2026, di Davos, Swiss.

Penandatanganan piagam ini menandai dimulainya operasional Board of Peace (BoP) sebagai badan internasional baru yang dibentuk untuk mengawali proses transisi, stabilisasi, dan reconstruksi Gaza pascakonflik.

Board of Peace merupakan badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, dan reconstruksi Gaza pada masa transisi pascakonflik.(rm/js)



Kim Jong Un Perkuat Senjata Nuklir

Dari Halaman 1

menunjukkan Kim dan putrinya, yang dianalisis oleh sejumlah pakar sebagai Ju Ae, saat menyaksikan peluncuran misil itu.

"Hasil dan arti dari uji coba ini akan menjadi sumber penderitaan mental yang luar biasa menyiksa dan ancaman serius terhadap pasukan yang mencoba memprovokasi konfrontasi militer dengan kami," ujar Kim, seperti dikutip AFP.

Rudal balistik itu ditembakkan ke arah Laut Jepang, dengan dua misil mendarat di luar Zona Ekonomi Eksklusif Korut, demikian dilaporkan agensi berita Jepang Jiji Press yang mengutip sumber kementerian pertahanan negara itu.

Menurut pemimpin Korut itu, misil-misil itu mengenai target di perairan dengan jarak sejauh 358,5 kilometer.

Meskipun pengembangan sistem peluncuran roket itu tidak berjalan mulus, Kim menilai uji coba ini sangat penting.

"Uji coba itu bermakna besar dalam meningkatkan efektivitas pencegah strategis kami," ujarnya.

Kim juga akan mengumumkan rencana untuk memperkuat kemampuan nuklir negaranya pada kongres partai yang akan datang, pada Rabu (28/1).

Kongres bersejarah Partai Pekerja Korut yang berkuasa diperkirakan akan digelar dalam beberapa pekan mendatang dan merupakan yang pertama dalam lima tahun.

"Kim mengatakan kongres partai itu akan menjelaskan rencana tahap selanjutnya untuk lebih memperkuat pencegah perang nuklir negara ini," kata kantor berita KCNA.

Sementara itu, peneliti utama di Korea Institute for Defense Analyses, Lee Ho Ryung mengatakan bahwa kongres yang akan datang kemungkinan akan melihat KIm mengumumkan "tujuan untuk memaksimalkan kemampuan operasional nuklir negara itu."

"Kim Jong Un telah menggunakan kongres partai sebelumnya untuk menekankan penyelesaian kemampuan nuklir negara ini, dan kali ini dia diperkirakan akan menyatakan bahwa kemampuan itu kini telah mencapai puncaknya," katanya.(cnni/js)

50 Kantong Jenazah, 34 Teridentifikasi

Dari Halaman 1

Dia mengatakan proses pencarian hingga saat ini masih dilakukan oleh 2.000 personel gabungan yang telah diterjunkan di lapangan. Namun, mempertimbangkan kondisi lapangan, pihaknya untuk sementara hanya menerjunkan 250 personel.

Menurut Syaifi'i, proses pencarian saat ini juga masih difokuskan di titik pemukiman warga, di mana 35 KK menjadi korban timbunan longsor.

Dapat Santunan Rp15 Juta

Menteri Sosial (Mensos) Saifully Yusuf atau Gus Ipul memastikan korban longsor akan

menerima santunan dari pemerintah. Gus Ipul mengatakan besaran santunan akan bervariasi. Bagi korban meninggal, santunan akan diterima ahli waris sebesar Rp15 juta, dan bagi korban luka berat menerima Rp5 juta.

"Untuk santunan bagi yang korban meninggal Rp15 juta rupiah, untuk yang luka-luka berat Rp5 juta," ujar Gus Ipul usai rapat di Komisi VIII DPR, Selasa sore.

Saat ini, lanjut Gus Ipul, pihaknya masih menunggu data resmi korban dari pemerintah daerah. Selain santunan, Gus Ipul memastikan pemerintah juga akan menyalurkan beberapa jenis bantuan lain seperti logistik hingga dapur

umum.

Bantuan juga akan diberikan dalam bentuk rehabilitasi tempat tinggal. Untuk itu, Kemensos akan berkoordinasi dengan BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Nantinya, lanjut Gus Ipul, Kemensos akan memberikan bantuan untuk mengisi perabotan rumah senilai Rp3 juta. Pemberian bantuan tersebut akan terlebih dahulu dilakukan asesmen oleh pemerintah setempat.

"Itu nanti ada bantuan dari kami untuk isian rumah sebesar Rp3 juta. Untuk isian rumah, untuk membeli perabotan rumah tangga," katanya. (cnni/js)

KPK Minta Alat

Dari Halaman 1

mengungkap alat yang dimaksud.

"Apa si sebenarnya hambatan paling besar yang di KPK selain tentang SDM yang kurang, ya berikanlah kami alat yang canggih, supaya OTT tidak hanya sekali sebulan, kurang canggih Pak, kurang canggih," ujar Fitroh.

"Ini sudah tidak up to date. Jadi kalau anggota Komisi III kasih anggaran besar buat beli barang kali OTT lebih masif," imbuhnya.

Sementara, Ketua KPK Setyo Budiyanto membantah pihaknya kini sedang sepi OTT. Menurut Setyo, dalam beberapa bulan terakhir, KPK terus melakukan OTT.

Akan tetapi, dia mengakui bahwa OTT dalam setiap bulan bukan target KPK. Sejauh ini, OTT hanya dilakukan sesuai informasi yang diterima KPK.

"Karena itu juga salah satu target kami, tapi sekali bukan target yang dipaksakan. Targetnya adalah sesuai dengan informasi yang kami dapatkan," katanya.(cnni/js)

Restrukturisasi Kredit

Dari Halaman 1

"Dapat kami laporan sampai akhir Desember 2025 telah diberikan restrukturisasi kredit menggunakan kredit relaksasi sebesar Rp12,58 triliun kepada 237.083 nasabah," ujar Mahendra dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (27/1).

Kebijakan relaksasi tersebut merupakan perlakuan khusus yang ditetapkan OJK bagi debitur terdampak bencana banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut. Kebijakan ini berlaku hingga tiga tahun sejak ditetapkan pada Desember 2025.

Mahendra menjelaskan perlakuan khusus atas kredit dan pembiayaan mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu yang Terkena Dampak Bencana.

Kebijakan tersebut mencakup sektor jasa keuangan yang luas, mulai dari perbankan, perusahaan pembiayaan (multifinance), modal ventura, lembaga keuangan mikro, hingga lembaga jasa keuangan lainnya.

Adapun bentuk perlakuan khusus yang diberikan antara lain:

1. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan berdasarkan ketepatan pembayaran (satu pilar) untuk plafon sampai dengan Rp10 miliar;

2. Penetapan kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukurisasi. Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang disalurkan baik sebelum maupun setelah debitur terkena dampak bencana. Untuk Penyelenggara LPBBTI, restrukturisasi dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemberi dana; dan

3. Pemberian pembiayaan baru terhadap debitur yang terkena dampak dengan penetapan kualitas kredit secara terpisah untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain baru (tidak menerapkan one obligor).(cnni/js)



Dari Halaman 1

merah itu. Ironisnya, justru mereka yang memiliki integritas disebut dicopot dari jabatannya. Salah satunya bahkan lebih memilih diberhentikan daripada menantang pengadilan yang dinilai menyimpang. Jika kesaksian ini benar, maka problem yang kita hadapi bukan lagi soal individu korup, melainkan sistem yang menghukum kejujuran.

Dalam narasi resmi, reformasi BUMN selalu digaungkan dengan kata-kata indah: profesionalisme, transparansi, dan meritokrasi. Namun kesaksian Ahok membuka ruang kecurigaan bahwa jargon tersebut kerap berhenti di spanduk dan pidato. Ketika pejabat berintegritas justru disingkirkan tanpa penjelasan berbasis kinerja, publik berhak bertanya: reformasi untuk siapa, dan oleh siapa?

Pernyataan Ahok yang mendorong jaksa memeriksa mantan Menteri BUMN hingga Presiden ke-7 RI memang menimbulkan kegaduhan. Secara hukum, jaksa benar ketika menegaskan bahwa kesaksian Ahok belum disertai bukti dokumen yang konkret. Namun dalam demokrasi, hukum tidak hidup di ruang steril. Ia berdampingan dengan etik kekuasaan dan tanggung jawab politik.

Memerlukan kebijakan bukan berarti menuduh bersalah. Justru di situah esensi negara hukum bekerja: memastikan bahwa keputusan strategis termasuk pencopotan direksi tidak menjadi pintu masuk kejahatan struktural. Jika kebijakan publik kebal dari pemeriksaan, maka hukum hanya akan menyentuh ranting, sementara akarnya dibiarakan tumbuh subur.